

BAB IV

ALASAN INTERVENSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP GENOSIDA RWANDA

Dalam dunia internasional terdapat beberapa aktor dengan perannya masing-masing, salah satunya ialah negara. Terdapat tiga prinsip sebagai pemikiran awal menurut paradigma realis. *Pertama*, negara merupakan aktor terpenting dalam hubungan internasional. *Kedua*, terdapat perbedaan antara politik dalam negeri dengan politik internasional. *Ketiga*, pusat perhatian kajian hubungan internasional ialah kekuatan dan perdamaian (Saeri, 2012).

Menurut Mohtar Masoed dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, sebuah negara pada dasarnya memiliki perilaku yang sama apabila menghadapi situasi yang sama. Selain itu, hubungan internasional didominasi oleh perilaku negara. Perilaku individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga akan menjadi perhatian jika perilaku mereka berkaitan dengan tindakan internasional sebuah negara.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa negara sebagai aktor terpenting dalam hubungan internasional harus memiliki keputusan dengan beberapa pertimbangan yang sangat hati-hati. Tindakan dari setiap negara dapat dipelajari dengan

menggunakan pendekatan berupa teori maupun konsep hubungan internasional yang dikemukakan para ahli.

Dalam hal ini, tindakan maupun keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat dapat dipelajari menggunakan metode tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Konsep Intervensi dan Teori Pilihan Rasional dengan pendekatan Model Aktor Rasional untuk mempelajari alasan Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap konflik Genosida Rwanda. Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini.

A. PILIHAN RASIONAL AMERIKA SERIKAT

Awal mulanya Amerika Serikat telah diperingatkan tentang genosida yang akan terjadi di Rwanda. Komunikasi dikirim melalui kabel, email dan telepon dari kedutaan Amerika Serikat di Kigali. Pada tahun 1993, Presiden Clinton memerintahkan pasukan Amerika Serikat ditarik dari Somalia setelah milisi Jenderal Aidede membunuh 18 Tentara Rangers. Para pembuat kebijakan di Washington DC tidak menginginkan Amerika Serikat terlibat dalam perang saudara Afrika lainnya. Presiden Clinton membatasi keterlibatan Amerika Serikat dalam operasi perdamaian PBB namun secara khusus memungkinkan intervensi dalam kasus genosida.

Pada awalnya Amerika Serikat tidak melihat kepentingannya cukup terpengaruh untuk memulai intervensi sepihak. Presiden Clinton sendiri dengan baik

mengartikulasikan memperhitungkan pemerintahannya selama peringatan D-Day di Prancis pada 7 Juni 1994 yang mengatakan tentang upaya bantuan kemanusiaan Amerika Serikat di Rwanda.

Dalam kasus ini Amerika Serikat tidak mendesak respon PBB karena melihat dua hasil potensial: otoritas pasukan PBB baru dan mandat baru tanpa sarana untuk mengimplementasikan keduanya. Bahkan hal yang lebih buruk lagi ialah kemungkinan bahwa Amerika Serikat harus memperbaiki sebuah misi PBB yang gagal.

Mengenai konflik genosida di Rwanda, para pejabat administrasi Presiden Clinton telah mengetahuinya, namun memutuskan untuk tidak mengambil tindakan untuk mencegah maupun menghentikan konflik genosida Rwanda tersebut. Hal ini dikarenakan Rwanda memiliki peringkat rendah dalam kepentingan Amerika Serikat (Ferroggiaro, 2004).

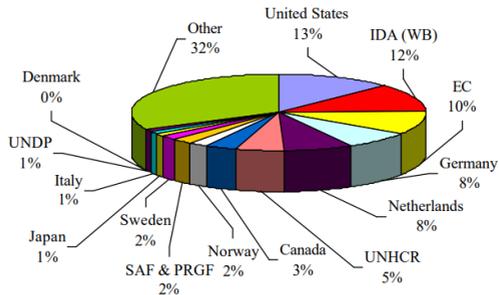
Banyak literatur pada genosida Rwanda merangkum bagaimana pembuat kebijakan Amerika Serikat tidak banyak terlibat ketika pecahnya konflik genosida Rwanda. Literatur secara tidak eksplisit memeriksa dilema etika dari agenda kebijakan luar negeri Pemerintahan Clinton pada saat itu. Di awal masa jabatan pertama Presiden Bill Clinton, Presidential Review Directive 13 telah menjadi platform bagi Amerika Serikat untuk bertindak di Afrika,

tetapi kegagalan di Somalia tiba-tiba menghentikan semua potensi keterlibatan di Afrika. Pada tahun 1999, Clinton membentuk doktrin intervensi untuk membenarkan keterlibatan Amerika Serikat di Bosnia, mencatat bahwa Amerika Serikat memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan dunia untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

Arthur J. Klinghoffer, orang pertama yang menulis buku tentang genosida Rwanda, mengeksplorasi prinsip-prinsip yang ditantang oleh konflik tahun 1990-an. Sejak pemerintahan Clinton dalam kebijakan luar negeri, kepresidenannya mengambil pendekatan realis dengan menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat untuk mempromosikan perdamaian. Namun dalam kasus Rwanda, ada batas untuk apa bantuan kemanusiaan dapat dicapai dan harus dilengkapi dengan dukungan militer. Klinghoffer menyebutkan alasan potensial di balik kegagalan PBB dan Amerika Serikat untuk campur tangan dalam genosida Rwanda. Amerika Serikat masuk jauh ke dalam Konvensi Genosida, tetapi gagal menyebutkan cara-cara yang bisa diintervensi Barat. Pada saat Amerika Serikat telah menerima serangkaian kabar penting tentang konflik Rwanda yang akan datang, tetapi Washington tidak bertindak atas intelijen yang diterima. (Klinghoffer, 1998).

Meskipun ada tawaran warga Ghana untuk mempertahankan pasukan Amerika di Rwanda, bersama dengan tawaran dari beberapa negara Afrika untuk memperkuat UNAMIR (*United Nations Assistance Mission for Rwanda*), Amerika Serikat tidak mau membuat komitmen keuangan untuk mendukung operasi yang diperluas. Amerika Serikat beserta kekuatan militer lainnya tidak mau mengambil resiko keselamatan warga negara mereka. Justru sebaliknya, Amerika Serikat telah mengorbankan 500 jiwa orang Rwanda dalam konflik genosida.

Amerika Serikat bersedia menggunakan sejumlah milyaran dana untuk menyelamatkan korban jiwa di Bosnia dimana penduduknya orang berkulit putih dan perang tersebut dekat kepentingan masyarakat Eropa. Namun berbeda dengan konflik di Rwanda, Amerika Serikat tidak mau melakukannya di Rwanda dikarenakan penduduknya berkulit hitam dan Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan strategis maupun ekonomi di negara ini (Stanton, 2004).



Grafik 4 1 Bantuan Utama terhadap Paska Konflik Rwanda 1994-2001. Sumber: Laporan Democratic Transition in Post-Conflict Societies Project

Presiden Clinton pada akhirnya bertanggung jawab atas kurangnya keterlibatan Amerika Serikat di Rwanda. Meskipun sejak saat itu dia telah mengalihkan beberapa kesalahan kepada Kongres, dia juga mengakui kegagalan untuk melibatkan sumber daya Amerika Serikat adalah salah satu penyesalan terbesarnya atas masa jabatannya. Presiden Clinton menegaskan bahwa kurangnya pemahaman tentang tingkat masalah di Rwanda lengah. Mengingat besarnya ukuran Amerika Serikat serta pengaruhnya yang sangat besar di seluruh dunia, sangat penting untuk memahami perspektif staf terdekatnya yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi keputusan ini juga. Mereka adalah anggota Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*), termasuk penasihat keamanan nasionalnya, Anthony Lake, serta Madeline Albright,

Sekretaris Pertahanan William Perry, Sekretaris Negara Warren Christopher, Direktur Central Intelligence Agency (CIA) James Woolsey dan Jenderal CJCS John Shalikashvili (Bissell, 2017).

Berdasarkan tindakan Amerika Serikat dalam konflik genosida Rwanda, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam mengintervensi konflik genosida Rwanda. Beberapa hal yang dipertimbangkan oleh Amerika Serikat sebagai Model Aktor Rasional ialah: *pertama*, Amerika Serikat tidak ingin mengirimkan pasukannya dan tidak ingin mengambil resiko terhadap kehidupan setiap warganya. Hal ini dikarenakan beberapa pasukan Amerika Serikat telah banyak yang tewas dalam memberikan bantuan militer di Somalia sehingga Amerika Serikat menarik semua pasukannya dan tidak ingin terlibat dalam konflik di Afrika. *Kedua*, Amerika Serikat tidak ingin memberikan bantuan secara finansial atau militer untuk mendukung UNAMIR dalam konflik genosida Rwanda. Hal ini dikarenakan penduduk Rwanda merupakan orang berkulit hitam, selain itu Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan terhadap Rwanda baik dalam bidang strategis maupun ekonomi.

Model Aktor Rasional menjelaskan bagaimana tindakan negara dalam menentukan keputusan terbaik yaitu dengan memperhitungkan *cost and benefit*. Dalam

intervensi Amerika Serikat terhadap konflik genosida Rwanda, meskipun Amerika Serikat memberikan bantuan terhadap Rwanda namun Amerika Serikat tidak ingin memberikan bantuan dalam bentuk finansial maupun militer untuk konflik genosida Rwanda. Bahkan Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya saat memberikan bantuan militer di Somalia dan tidak ingin melibatkan pasukannya dalam konflik di Afrika lagi. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat sebagai model aktor rasional tidak ingin pasukannya tewas dalam konflik di Afrika. Selain itu, intervensi Amerika Serikat dalam bidang militer terhadap konflik genosida Rwanda dianggap tidak memiliki *benefit* yang cukup besar terhadap kepentingan Amerika Serikat. Oleh karena itu pilihan rasional Amerika Serikat terhadap konflik genosida Rwanda ialah tidak melakukan intervensi militer agar korban jiwa dari pasukan Amerika Serikat tidak bertambah lagi.

Meskipun Amerika Serikat memutuskan untuk tidak melakukan intervensi militer terhadap konflik genosida Rwanda, namun Amerika Serikat melakukan intervensi kemanusiaan dengan tujuan untuk memberikan bantuan dan mengurangi korban jiwa dari konflik genosida Rwanda tersebut.

Mengacu pada Graham T. Allison, maka pemetaan model aktor rasional pada pilihan intervensi kemanusiaan

terhadap konflik genosida Rwanda dapat dilihat pada tabel berikut:

<p><i>Action as Rational Choice</i></p>	<p>Penjelasan Graham T. Allison</p>	<p>Sikap Amerika Serikat dalam Intervensi Kemanusiaan terhadap genosida Rwanda</p>
<p><i>Goal and Objectives</i></p>	<p>Sebelum menentukan tujuan, para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti keuntungan, kegunaan maupun prefensi. Berdasarkan skala tujuan tersebut, maka para pembuat kebijakan dapat memetakan beberapa</p>	<p>Tujuan Amerika Serikat dalam intervensi kemanusiaan terhadap genosida Rwanda, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keuntungan: kepentingan Amerika Serikat terpenuhi. - Kegunaan: menjaga perdamaian internasional.

	kemungkinan yang terjadi.	- Preferensi: mengakhiri penderitaan korban genosida.
<i>Alternatives</i>	Pada tahap ini pembuat kebijakan memilih dari beberapa alternatif yang tersedia. Setiap alternatif tersebut harus memiliki spesifikasi tindakan yang berbeda.	- Intervensi kemanusiaan - Intervensi militer
<i>Consequences</i>	Setiap kebijakan alternatif tersebut memiliki konsekuensi masing-masing. Penentuan konsekuensi yang relevan ialah dengan mempertimbangkan <i>cost</i> dan <i>benefits</i> .	Intervensi kemanusiaan: - <i>Benefit</i> : mengakhiri penderitaan korban genosida. - <i>Cost</i> : Biaya bantuan kemanusiaan yang besar

		<p>Intervensi militer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Benefit</i>: menindaklanjuti para pemberontak - <i>Cost</i>: risiko terhadap keselamatan pasukan Amerika Serikat.
<i>Choice</i>	<p>Pembuat kebijakan menentukan suatu pilihan dari beberapa kebijakan alternatif yang menurutnya paling memungkinkan untuk mencapai tujuannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Choice</i>: Intervensi kemanusiaan - Alasan: Amerika Serikat tidak ingin mengambil risiko atas keselamatan pasukannya. Hal ini berdasarkan pertimbangan <i>cost</i> dan <i>benefit</i> dalam konsekuensi

		intervensi kemanusiaan.
--	--	----------------------------

Tabel 4. 1 Intervensi kemanusiaan sebagai pilihan rasional Amerika Serikat.

B. MENGAKHIRI PENDERITAAN KORBAN GENOSIDA

Intervensi Amerika Serikat selama konflik genosida tidak seefektif dari yang diperkirakan, intervensi dapat dikatakan maksimal apabila dapat menyelamatkan 125 ribu jiwa. Respon Amerika Serikat yang datang terlambat diusulkan pada Mei 1994, yang secara realita mengharapakan warga Tutsi dapat melintasi daerah yang dipenuhi milisi untuk mencapai zona aman di luar Rwanda, dalam hal ini diperkirakan telah menyelamatkan 75 ribu jiwa (Stanton, 2004).

250 ribu pasukan operasi khusus Amerika Serikat berdiri di Burundi untuk membantu korban genosida dan evakuasi warga Amerika Serikat. Selain itu juga terdapat puluhan ribu pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Eropa, Teluk Persia, Samudra Hindia dan tempat-tempat lain yang terletak lebih dekat dengan Rwanda.

Masalah utama sejak awal UNAMIR ialah seluruh kekuatan Barat tidak mau megirimkan pasukan untuk

campur tangan bahkan untuk menyediakan transportasi udara dan pembiayaan pasukan internasional. sehingga hanya pasukan dari Bangladesh dari warga Ghana yang tersedia. Sementara itu pasukan Belgia hanya berjumlah 420 orang dan mundur setelah beberapa hari setelah pembantaian terhadap sepuluh tantara Belgia. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat sebagai pemimpin Dewan Keamanan PBB memilih untuk mundur dan menarik pasukannya.

Fakta bahwa 456 sisa pasukan penjaga perdamaian UNAMIR (*United Nations Assistance Mission for Rwanda*) mampu menyelamatkan setidaknya 25 ribu jiwa dengan melindungi orang-orang yang berlindung di gereja, stadion dan hotel. Di beberapa tempat yang dilindungi oleh 456 relawan UNAMIR sebagian besar orang selamat.

Dampak yang ditimbulkan dari genosida Rwanda tidak lain ialah jumlah korban jiwa yang mencapai 800ribu jiwa selama seratus hari pembantaian. Jumlah ini menunjukkan bahwa 8ribu jiwa tewas setiap harinya. Selain itu, genosida Rwanda juga menyebabkan kurangnya populasi Rwanda secara drastis, terutama populasi laki-laki yang mengakibatkan tidak seimbangny demografis dimana populasi perempuan lebih mendominasi hingga 70% paska genosida Rwanda. Hal ini mengakibatkan perempuan

menjadi aktor utama dalam rekonstruksi paska genosida Rwanda (Desforges, 1999).

Sebanyak 800ribu koban jiwa genosida Rwanda dibunuh oleh para etnis Hutu menggunakan benda tajam ala-alat pertanian mereka (Jatmika, 2016). Genosida Rwanda menggambarkan pelanggaran HAM yang nyata serta ketakutan terbesar bagi manusia dimana seorang suami menyaksikan istrinya diperkosa lalu dibunuh, seorang istri menyaksikan suaminya dikubur hidup-hidup, para orangtua menyaksikan anak-anak mereka disembelih, anak-anak menyaksikan orangtua mereka dibantai, bahkan pembantaian dalam genosida Rwanda berupa menjebak warga untuk berkumpul dalam suatu ruangan kemudian menembak mati mereka semua (Kalsum, 2014).

Pada hari awal-awal kekerasan, Amerika Serikat mencurahkan semua upayanya untuk mengamankan evakuasi lebih dari 250 warga negara Amerika Serikat di Rwanda dan meningkatkan kembali kehadiran PBB. Pada 11 April 1994, evakuasi Amerika Serikat telah selesai. Pada saat yang sama, para diplomat Amerika Serikat menarik misi penjaga perdamaian PBB yang dikenal sebagai UNAMIR.

Pada Mei 1994, ketika angka kematian meningkat, beberapa tekanan dibangun agar misi diperkuat dengan kapasitas untuk melindungi warga sipil. Amerika Serikat

mengusulkan sebuah misi yang beroperasi di Burundi dan berfokus pada perlindungan para pengungsi di sepanjang perbatasan. Pada 6 Mei 1994, Susan Rice (anggota *National Security Council*) menguraikan langkah-langkah yang bersedia diambil Amerika Serikat untuk mengatasi krisis, termasuk penggunaan diplomatik untuk menekan gencatan senjata dan dukungan untuk bantuan kemanusiaan. Amerika Serikat juga mengisyaratkan dukungan rencana untuk mengerahkan pasukan internasional di zona yang dilindungi di sepanjang perbatasan Rwanda dengan Burundi. Pada akhirnya Amerika Serikat menang dalam skala resolusi yang menjanjikan lebih dari 5ribu tantara untuk memberlakukan embargo senjata dan melindungi warga sipil (Lynch, 2015).

Seorang pakar militer di Sekretariat memperkirakan bahwa idealnya misi perdamaian seharusnya ada 8ribu pasukan. Dallaire, pemimpin UNAMIR mengusulkan 4.500 sebagai opsi maksimal. Namun Sekretariat merekomendasikan hanya setengah dari jumlah tersebut. Pada tanggal 5 Oktober Dewan Keamanan menyetujui 2.548 personel militer. Hambatan yang menentukan dalam misi perdamaian adalah pendanaan. Dalam 31% dari total biaya pemeliharaan perdamaian PBB, Amerika Serikat bersikeras terhadap penggunaan minimal. Pemerintahan Clinton memulai tinjauan eksekutif kebijakan PBB dan

peka terhadap kekhawatiran Kongres atas meningkatnya jumlah biaya pemeliharaan perdamaian Amerika Serikat, yang telah meningkat 37% dari tahun 1992 hingga tahun 1993. Selain itu, UNAMIR diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 10 juta USD setiap bulan. Jumlah yang sangat rendah dibandingkan dengan operasi pemeliharaan perdamaian PBB lainnya (Millwood, 1996)

Setelah konflik genosida Rwanda terjadi krisis terhadap wanita, anak-anak, serta orang tua menjadi sangat rentan. Khususnya pada wanita dan anak-anak. Konflik genosida mengubah komposisi demografis Rwanda sehingga perempuan mencapai 60% hingga 70% dari populasi. Anak-anak di seluruh Rwanda mengalami trauma parah serta banyak yang menjadi yatim piatu maupun ditinggalkan. Masyarakat yang terluka setelah konflik genosida membutuhkan penyembuhan pada tingkat kelompok dan individu.

Antara sepertiga dan setengah dari jumlah wanita merupakan janda dan sebagian besar merupakan kepala rumah tangga. Dalam sejumlah kasus, beberapa wanita ini kehilangan barang-barangnya, rumah dan keluarga mereka dalam konflik genosida. Mata pencaharian mereka terganggu dan tidak sedikit yang merawat anak kerabat mereka. Ribuan perempuan diperkosa dan harus merawat anak hasil pemerkosaan tersebut. Dalam hal ini wanita dan

anak-anak merupakan korban yang paling banyak penderitanya (Woman, 1995).

	1992	1995
Female share of population	52	60–70
Female-headed households	21	29–40
Widows	4	n/a

Tabel 4 2 Dampak konflik genosida (dalam satuan persen)

Selama tahap awal bantuan darurat, perempuan tidak diberi perlakuan khusus sebagai kelompok. Pada umumnya bantuan bahan makanan diberikan kepada keluarga dengan harapan bahwa semua anggota rumah tangga akan menerima bagian yang adil dan mendapat manfaat dari bantuan tersebut.

Salah satu aspek kerentanan para korban genosida adalah bahwa perempuan menurut tradisi Rwanda tidak memiliki tanah. Mereka umumnya bertani di tanah ayah mereka kemudian tanah suami mereka. Di bawah hukum Rwanda, hak milik asset rumah tangga dipegang oleh laki-laki. Akibatnya, para janda dan anak perempuan yatim piatu berisiko kehilangan harta mereka kepada saudara laki-laki.

Satu tahun setelah genosida, tidak ada program nasional dukungan keluarga yang komprehensif. Namun

seiring berjalannya waktu USAID bekerja di masyarakat mulai mengenali kebutuhan para perempuan serta para janda, korban kekerasan dan perkosaan, serta kepala rumah tangga, dalam mengembangkan inisiatif khusus untuk mendukung masyarakat dalam merawat mereka yang paling rentan.

Butuh waktu lama agar pembantaian di Rwanda diakui sebagai genosida terhadap etnis Tutsi. Namun, dunia internasional terus berpaling setiap hari. Bukan hanya di Rwanda, tetapi juga di Yaman, Kongo, Myanmar, Sudan Selatan di Sahel. Ini tidak selalu merupakan pembunuhan massal, tetapi juga serangan kecil yang terjadi setiap hari dan sebagian besar diabaikan.

Pada tahun 1994 PBB membentuk *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang merupakan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda. ICTR memiliki tujuan untuk menuntut serta mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas terjadinya genosida Rwanda dan kejahatan berat yang melanggar hukum humaniter internasional di Rwanda. Sejauh ini, ICTR telah menyelesaikan 55 kasus (Jatmika, 2016).

Hanya satu anggota Kongres yang tercatat pada bulan Mei yang menyatakan bahwa kepentingan Amerika Serikat telah tersentuh untuk menghentikan genosida di mana pun hal itu terjadi. Bahkan arus keluar pengungsi yang

signifikan sebanyak 200 ribu pada akhir Mei tidak membuktikan bahwa dengan mengurangi kekerasan di Rwanda maka arus keluar pengungsi juga akan berkurang, sehingga hal ini menyentuh kepentingan Amerika Serikat merespon dengan operasi bantuan kemanusiaan yang besar dan mahal (Millwood, 1996).

Berdasarkan tindakan Amerika Serikat dalam konflik genosida Rwanda, dapat dilihat bahwa bentuk intervensi yang diambil oleh Amerika Serikat ialah intervensi kemanusiaan. Tindakan intervensi kemanusiaan dilakukan oleh Amerika Serikat selama konflik maupun paska konflik. Tindakan intervensi kemanusiaan yang dilakukan Amerika Serikat selama konflik selain untuk mengurangi jumlah korban jiwa, tujuan utama Amerika Serikat melakukan intervensi kemanusiaan terhadap konflik genosida Rwanda ialah untuk menyelamatkan warga negaranya. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Amerika Serikat pada saat awal konflik yang mencurahkan seluruh upayanya untuk mengamankan dan menevakuasi lebih dari 250 warga negara Amerika Serikat. Evakuasi Amerika Serikat ini berakhir pada 11 April 1994.

Ketika jumlah korban meningkat, Amerika Serikat bersedia melakukan intervensi kemanusiaan, sebanyak 250 ribu pasukan operasi khusus Amerika Serikat berdiri di Burundi. Selain itu juga terdapat puluhan ribu pasukan

Amerika Serikat yang ditempatkan di Eropa, Teluk Persia, Samudra Hindia dan tempat-tempat lain yang terletak lebih dekat dengan Rwanda. Dalam 31% dari total biaya pemeliharaan perdamaian PBB, Amerika Serikat bersikeras terhadap penggunaan minimal.

Tindakan intervensi kemanusiaan Amerika Serikat paska konflik ialah untuk mengatasi krisis terhadap wanita, anak-anak, serta orang tua. Pada paska konflik, jumlah perempuan mencapai 60% hingga 70% dari populasi. Anak-anak di seluruh Rwanda mengalami trauma parah serta banyak yang menjadi yatim piatu maupun ditinggalkan. Bantuan kemanusiaan Amerika Serikat melalui USAID, bekerja di masyarakat dengan memenuhi kebutuhan para perempuan serta para janda, korban kekerasan dan perkosaan, serta kepala rumah tangga, dalam mengembangkan inisiatif khusus untuk merawat para korban paska genosida Rwanda.